

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. 2012. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press.
- Nadapdap, Binoto. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Salim HS. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- , 2017. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.

Skripsi/Tesis

- Berlianda, Revian Mia. 2016. *Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Studi Kasus PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah)*. Skripsi. Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Irawan, Eriek Wahyu. 2015. *Akibat Hukum Perubahan Bentuk BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Anindya (Studi Kasus)*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Koesoemaningtyas, Anggraini. 2016. *Analisis Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas pada PT. BPD DIY*. Skripsi. Program Studi Strata-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786)

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2003 Nomor 7 Seri E dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 40)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2014 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 151)

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Boyolali Kepada Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 170)

Internet

<https://www.bps.go.id/statictable/2009/02/20/1267/penduduk-indonesia-menurut-provinsi-1971-1980-1990-1995-2000-dan-2010.html> ,

<http://www.bpkp.go.id/puslitbangwas/konten/2291/14.125-Reviu-Literatur-Pengelolaan-Badan-Usaha-Milik-Daerah> .

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59c1d986cb252/kepemilikan-100-persen-saham-bumd-oleh-satu-daerah> .

<http://www.boyolali.go.id/perusahaan-daerah/> .

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ca2fd2e5cc85/perubahan-status-bpr-dari-perusahaan-daerah-menjadi-pt>

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt545c50bc63e5d/status-perjanjian-jika-direksi-perusahaan-menjadi-tersangka>